



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN MEI 2017**

Pendahuluan

Komnas HAM dapat dikatakan merupakan lembaga pertahanan terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 31 Mei 2017, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **556 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

No	Kategori Berkas	Jumlah
1	Berkas Kasus Baru 1x	63
2	Berkas Kasus Lanjutan	335
3	Berkas File Baru 1x	89
4	Berkas File Lanjutan	69
	Jumlah	556

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	2	20	Kalimantan Barat	3
2	Sumatera Utara	36	21	Kalimantan Selatan	4
3	Bengkulu	0	22	Kalimantan Tengah	2
4	Jambi	4	23	Kalimantan Timur	7
5	Riau	20	24	Kalimantan Utara	0
6	Sumatera Barat	30	25	Gorontalo	0
7	Sumatera Selatan	15	26	Sulawesi Selatan	20
8	Lampung	14	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	28	Sulawesi Tengah	13
10	Kepulauan Riau	3	29	Sulawesi Utara	5
11	Banten	11	30	Sulawesi Barat	0
12	Jawa Barat	49	31	Sulawesi Selatan Barat	0
13	DKI Jakarta	128	32	Maluku	24
14	Jawa Tengah	43	33	Maluku Utara	0
15	Jawa Timur	51	34	Papua	6
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	35	Papua Barat	2
17	Bali	6	36	Tanpa Alamat	36
18	Nusa Tenggara Barat	10			
19	Nusa Tenggara Timur	3		Jumlah	556

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	319
2	Subkomisi mediasi	75
3	Tim 65	3
4	Tim KZ	1
5	File	158
Jumlah		556

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	301
2	Tembusan	251
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	4
Jumlah		556

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	63
2	Pos	436
3	Fax	13
4	Email	25
5	Online	8
6	Audiensi	9
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	2
Jumlah		556

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	17
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	4
4	Hak memperoleh keadilan	181
5	Hak atas kebebasan pribadi	13
6	Hak atas rasa aman	49
7	Hak atas kesejahteraan	215
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	6
9	Hak perempuan	2
10	Hak anak	3
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	66
Jumlah		556

6.1. Klasifikasi pengaduan

	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	5
Lingkungan hidup	12
	17
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	3

Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	4
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	130
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	13
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	33
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	5
	181
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	2
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	3
Berkumpul, berapat, dan berserikat	3
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	1
Menyampaikan pendapat di muka umum	3
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
	13
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	5
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	12
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	9
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	13
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	10
	49
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	8
Hak atas kepemilikan tanah	106
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	43
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	19

Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	29
Hak atas kesehatan	7
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
	215
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	3
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	3
	6
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	0
Hak atas kesetaraan dengan suami	2
	2
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	2
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	1
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	3
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	0
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
	0
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	66
Jumlah Seluruh	556

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	POLRI	1
2	Lembaga Masyarakat dan/atau Rumah Tahanan Negara	1

3	Korporasi	6
4	Individu - Orang seorang	274
5	Individu - Anak	4
6	Individu - Perempuan	14
7	Individu - Buruh migran	2
8	Individu - Pekerja/Profesi	29
9	Individu - Suku	1
10	Individu - Ras dan etnis	1
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
12	Individu - Narapidana	7
13	Kelompok - Masyarakat	142
14	Kelompok - Anak-anak	3
15	Kelompok - Pekerja	23
16	Kelompok - Masyarakat Adat	19
17	Kelompok - Ras dan Etnis	1
18	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	3
19	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
20	Organisasi	4
21	Warga Negara Asing (WNA)	3
22	Tanpa Keterangan Pihak Korban	15

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (kementerian)	46
2	Pemerintah daerah	65
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (non kementerian)	12
5	Lembaga peradilan	46
6	POLRI	175
7	TNI	26
8	Kejaksaan	12
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	5
10	Pemerintah negara lain	1
11	Korporasi	85
12	BUMN/BUMD	24
13	Lembaga pelayanan kesehatan	1
14	Lembaga pendidikan	5
15	Individu - Orang seorang	11
16	Individu - Pekerja/Profesi	6
17	Individu - Suku	1
18	Kelompok - Masyarakat	7
19	Kelompok - Pekerja	1

20	Organisasi	9
21	Warga Negara Asing (WNA)	0
22	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	18

9. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi serta ditangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan saat ini sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
20	50	41	111

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, **diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.**

10. Penomoran kasus untuk pengaduan baru 1 (satu) kali

Periode Mei 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan memberikan nomor kasus untuk berkas pengaduan dengan kategori (i) baru 1 (satu) kali; dan (ii) berkas lanjutan File yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM³ selanjutnya dapat ditangani oleh Komnas HAM dengan perincian distribusi sebagai berikut:

Pemantauan	Mediasi	Jumlah
------------	---------	--------

¹ Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

² Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

³ Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

77	15	92
----	----	----

B. Kegiatan Rutin Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan tidak melakukan kegiatan rutin selama Mei 2017.

C. Kegiatan Lainnya:

Diskusi Bulanan

Disamping kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan diatas, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan melaksanakan kegiatan lainnya yaitu Diskusi Bulanan. Pada 31 Mei 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mengadakan kegiatan diskusi bulanan dengan tema **“Pengendalian Tembakau dalam Perspektif HAM”** dengan narasumber yaitu Kasubbag Dukungan Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak SIPOK Komnas HAM Sdr. Elfansuri Chairah.

D. Rencana Kegiatan Satu Bulan Ke Depan

Bersama ini disampaikan rencana kegiatan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan selama satu bulan ke depan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diskusi Bulanan Juni 2017

Diskusi bulan Juni 2017 akan dilaksanakan dengan narasumber dari LBH Jakarta. Kegiatan untuk sementara dijadwalkan pada 14 Juni 2017 dengan tema **“Proses Pendampingan Hukum di Kepolisian”**. Adapun PIC dalam kegiatan ini adalah Sdr. Reza Perdana.

2. *Stock Opname* Arsip Pengaduan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh

Kegiatan *Stock Opname* Arsip Pengaduan Kantor perwakilan Komnas HAM Aceh akan diselenggarakan pada 19 -21 Juni 2017. Tim yang akan bertugas yaitu (i) Rima P. Salim, (ii) Bayu Pamungkas, (iii) Hananto KP, dan (iv) A. M. Deniriawan. PIC dalam kegiatan ini adalah Hananto K. P.

E. Penutup

Demikian laporan bulanan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan.

Jakarta, 2 Juni 2017

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim